



## Implementasi Kebijakan Mitigasi Dan Kesiapsiagaan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima

Mas'ud<sup>1</sup>, Haeril<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

\*Corresponding Email: [Masud@stisipbima.ac.id](mailto:Masud@stisipbima.ac.id)

**Abstract.** *The aim of this research is to determine the implementation of mitigation and preparedness policies regarding disaster management in the Bima Regency area. This study used descriptive qualitative method. The location of this research is at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) Bima Regency Office. Data collection techniques consist of observation, interviews and documentation. The research results show that regional capacity level data in disaster management shows that aspects of community preparedness through PODES data and in-depth interviews with office holders at the sub-district level are still very weak. That due to the weak regional capacity index in efforts to reduce disaster risk, the level of preparedness for various types of disasters in the community is also low, automatically the level of risk that will occur in the community is very vulnerable. Community preparedness policies have not yet become a priority activity. However, in strengthening preparedness, the Regional Government of Bima Regency has implemented institutional technical capacity policies as well as strong disaster emergency management mechanisms with a disaster risk reduction perspective. The Bima Regency Government is also exploring ready disaster contingency plans at all levels of Government, holding regular exercises to test and develop disaster emergency response programs. And most importantly, the Regional Government must provide financial and logistical reserves as well as anticipatory mechanisms that are ready to support effective disaster management efforts. One of the efforts of the Bima Regency Regional Government is to determine priority disasters. Determining priority disasters in Bima Regency using a priority disaster matrix based on data on disaster risk levels and data on trends in disaster occurrence for each type of disaster.*

**Keywords:** *Implementation, Management, Mitigation, preparedness and disaster*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan mitigasi dan kesiapsiagaan tentang penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data tingkat Kapasitas Daerah dalam penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa aspek kesiapsiagaan masyarakat melalui data PODES dan in-depth interview pada pemangku jabatan di tingkat kecamatan masih sangat lemah. Bahwa akibat lemahnya indeks kapasitas daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana, menyebabkan tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap berbagai jenis bencana juga rendah, otomatis tingkat resiko yang akan terjadi pada masyarakat sangat rentan. Kebijakan kesiapsiagaan masyarakat belum menjadi prioritas kegiatan. Namun dalam memperkuat kesiapsiagaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima telah menerapkan kebijakan kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan resiko bencana. Pemerintah Kabupaten Bima juga mendalami rencana kontingensi bencana yang siap di semua jenjang Pemerintahan, pengadaan latihan reguler untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana. Serta yang paling penting Pemerintah Daerah harus menyediakan cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanggulangan bencana yang efektif. Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima adalah dengan menetapkan bencana prioritas. Penentuan bencana prioritas di Kabupaten Bima dengan menggunakan matrik bencana prioritas berdasarkan data tingkat risiko bencana, dan data kecenderungan kejadian bencana untuk masing-masing jenis bencana.

**Kata Kunci:** Implementasi, Penanggulangan, Mitigasi, kesiapsiagaan, dan bencana

## PENDAHULUAN

Penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik pemerintah, swasta maupun seluruh elemen lapisan masyarakat ikut bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana untuk keselamatan diri, keluarga serta lingkungan tempat hidupnya. Pemerintah Kabupaten Bima menjadi penanggungjawab dalam pencegahan, penanggulangan bencana, kesiapsiagaan dan peringatan dini terjadinya bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bima. Demikian salam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap daerah harus melakukan persiapan sebelum, sesaat dan sesudah tragedi. Hal-hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat terlebih dahulu adalah pemetaan bangunan, pemetaan lapisan tanah, pemberdayaan manusia dan penelitian lebih lanjut.

Faktor penghambat kebijakan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bima adalah luasnya wilayah Kabupaten Bima dan faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah. Sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya dukungan dari organisasi kemasyarakatan kebencanaan, instansi terkait saling mendukung dan memfasilitasi, serta Peraturan Bupati Bima (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Bima.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti mengenai Impelementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah, masyarakat Kabupaten Bima ditemukan fenomena masalah sebagai berikut: 1) komunikasi yang dilakukan mengenai mitigasi bencana ini masih kurang, contoh masih kurangnya kesadaran dan kerjasama di lingkungan SKPD dan masyarakat tentang mitigasi bencana yang bisa dilihat dari sosialisasi yang belum optimal serta kurangnya kesadaran pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan di lingkungan masyarakat agar tidak mengakibatkan terjadinya bencana alam, 2) sumber daya yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima masih kurang, ini bisa dilihat dari; a) jumlah sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Bima adalah 53 orang, sedangkan menurut Kepala BPBD Kabupaten Bima idealnya jumlah tenaga kerja yang harus ada adalah 73 orang, b) sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Bima pun secara keseluruhan dapat dikatakan masih kurang.

Oleh karena demikian adapun tujuan penelitian ini adalah ntuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tentang penanggulangan bencana daerah dan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dari keberhasilan implementasi kebijakan tentang penanggulangan bencana daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Subyek penelitian ini dipilih melalui teknik *nonprobability sampling*, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan aspek tertentu. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus lakukan adalah tahap analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari dari tiga hal utama, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL PENELITIAN

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Kebijakan penanggulangan bencana merupakan suatu kebijakan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip dasar penanggulangan bencana di Kabupaten Bima. Prinsip ini harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima dan selaras dengan prinsip penanggulangan bencana provinsi dan Nasional yang mengupayakan prinsip Cepat dan Tepat, Prioritas, Koordinasi dan Keterpaduan, transparansi dan Akuntabilitas, Kemitraan dan Pemberdayaan.

Namun fungsi dan prinsip diatas belum maksimal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Indeks ketahanan bencana Kabupaten Bima berada pada level 3. Hal ini menjelaskan bahwa Kabupaten Bima telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana, namun dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis serta lemahnya daya dukung anggaran dalam penanggulangan bencana. Capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

Demikian pada aspek tingkat kesiapsiagaan Daerah Kabupaten Bima terhadap ancaman berabagai bencana. Pada *framework* yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan masyarakat terdiri dari 5 (lima) paramater dengan 18 Indikator. Sehingga didapati hasil analisis data tingkat kesiapsiagaan Daerah Kabupaten Bima dengan *tools* yang ada memperoleh tingkat kesiapsiagaan Kabupaten Bima pada level rendah dan sangat mengawatirkan. Dimana secara umum tingkat kesiapsiagaan Kabupaten Bima dalam menghadapi bahaya bencana banjir, Gempabumi, tsunami, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api, dan epidemi dan wabah penyakit, berada pada tingkat kesiapsiagaan yang rendah.

Rendahnya level ketahanan dan kesiapsigaan Daerah Kabupaten Bima dalam upaya penanggulangan setiap jenis Bencana, otomatis berdampak pada kapasitas atau kemampuan dalam upaya mengurangi resiko bencana di Daerah Kabupaten Bima. Kapasitas atau kemampuan merupakan hal terpenting yang harus di tingkatkan dalam menyelenggarakan pengurangan risiko bencana di daerah Kabupaten Bima baik secara individu maupun secara kelompok.

Berikut adalah tabel Kapasitas atau kemampuan Daerah Kabupaten Bima dalam mengurangi resiko bencana;

**Tabel 1. Tingkat Kapasitas Bencana di Kabupaten Bima**

No	Bencana	Indeks Kapasitas Daerah		Indeks Kesiapsiagaan Desa		Tingkat Kapasitas Daerah	
		Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat
1	Banjir	0,666	Sedang	0,333	Rendah	0,3022	Rendah
2	Cuaca Ekstrim	0,666	Sedang	0,333	Rendah	0,4662	Sedang
3	Epidemi dan Wabah Penyakit	0,666	Sedang	0,333	Rendah	0,4662	Sedang
4	Gempabumi	0,666	Sedang	0,333	Rendah	0,4662	Sedang
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0,666	Sedang	0,333	Rendah	0,2664	Rendah
6	Kekeringan	0,666	Sedang	0,4605	Sedang	0,4662	Sedang
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,666	Sedang	0,4564	Sedang	0,2839	Rendah
8	Letusan Gunungapi	0,666	Sedang	0,333	Rendah	0,3024	Rendah
9	Tanah Longsor	0,666	Sedang	0,333	Rendah	0,4662	Sedang
10	Tsunami	0,666	Sedang	0,333	Rendah	0,4662	Sedang

Data tingkat Kapasitas Daerah dalam penanggulangan Bencana di atas didapat melalui kajian tingkat kapasitas yang diukur pada aspek ketahanan daerah berdasarkan HFA dan aspek kesiapsiagaan masyarakat melalui data PODES dan indepthinterview pada pemangku jabatan di tingkat kecamatan.

Dari data diatas menunjukkan, bahwa akibat lemahnya indeks kapasitas daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana, menyebabkan tingkat kesiapsiagaan Desa terhadap berbagai jenis bencana juga rendah, otomatis tingkat resiko yang akan terjadi pada masyarakat sangat rentan.

Padahal sebagai pelajaran, kejadian bencana di Indonesia selama ini telah menghasilkan banyak korban jiwa akibat lemahnya persiapan dan kesiapsiagaan masyarakat yang rendah, terutama dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kepedulian akan fenomena dan bencana yang akan terjadi. Pemerintah dan masyarakat Indonesia selama ini memfokuskan pengelolaan bencana pada kegiatan tanggap darurat dan kegiatan rehabilitasi, serta rekonstruksi pascabencana. Namun kesiapsiagaan masyarakat belum menjadi prioritas kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima harus melakukan penetapan kebijakan, peningkatan kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana. Perlunya melakukan pengkajian dalam penilaian kemampuan yang dimiliki secara perorangan, rumah tangga, peran masyarakat dan kelompok untuk mengatasi suatu bahaya bencana yang mengancam daerahnya, terutama di wilayah pedesaan.

Demikian dari data ketahanan dan kesiapsiagaan diatas, menunjukkan bahwa perlunya upaya antisipasi secara serius mengingat konsekuensi dari potensial bahaya yang akan muncul sangat rentan. Perlunya kelembagaan yang fleksibel dan sigap untuk mengupayakan sistem peringatan dini, serta sosialisasi yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat agar kebijakan penanggulangan bencana bisa berjalan dengan baik.

Perlu diupayakan tindakan-tindakan dan rencana-rencana yang sistematis yang di dukung sepenuhnya oleh lembaga pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bima dengan komitmen yang kuat dalam pengurangan risiko bencana. Penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan secara periodik juga perlu di optimalkan. Demikian juga Sosialisasi kebencanaan dan cara-cara pengurangan risiko bencana kepada seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta budaya aman dari bencana di Kabupaten Bima. Kemudian perlunya pemberdayaan masyarakat yang sinergis berbasis lokalitas, risiko, dan proses saling berbagi antar pelaku dengan mengedepankan kemandirian sumber daya. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan perbaikan kerusakan lahan/lingkungan secara mandiri. Dan yang terpenting, Pemerintah Daerah harus mengupayakan penyediaan mata pencaharian alternatif masyarakat di daerah rawan bencana. Dengan perkuatan sumber mata pencaharian non-alam sebagai pilihan mata pencaharian alternatif untuk masyarakat di daerah rawan bencana.

Kemudian untuk memperkuat kesiapsiagaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima perlu menerapkan kebijakan kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana. Kemudian rencana kontingensi bencana yang siap di semua jenjang Pemerintahan, pengadaan latihan reguler untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana. Serta yang paling penting Pemerintah Daerah harus menyediakan cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanggulangan bencana yang efektif.

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima adalah dengan menetapkan bencana prioritas. Penentuan bencana prioritas di Kabupaten Bima dengan menggunakan matrik bencana prioritas berdasarkan data tingkat risiko bencana, dan data kecenderungan kejadian bencana untuk masing-masing jenis bencana. Data tingkat risiko bencana di dapat dari hasil analisis data dan peta risiko bencana, sedangkan data kecenderungan kejadian bencana masing-masing jenis bencana diperoleh melalui website resmi BNPB yaitu [www.bnpb.dibi.go.id](http://www.bnpb.dibi.go.id) sebagai pangkalan data dan informasi kebencanaan Indonesia, dan juga dukungan data dari BPBD Kabupaten Bima.

Kebijakan Penetapan Bencana prioritas tersebut diadaptasi menjadi kebijakan daerah dalam penanggulangan bencana akibat adanya keterbatasan sumber daya serta pembatasan kewenangan daerah. Sehingga didapati data bahwa bencana yang menjadi prioritas penanggulangan di Kabupaten Bima adalah Banjir, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem, Gunungapi, dan Tanah Longsor hal ini disebabkan oleh tingkat risiko yang ditimbulkan oleh bencana-bencana tersebut adalah tinggi demikian dengan indeks kecendrungan kejadian bencana tersebut tetap ataupun bahkan meningkat.

Berikut adalah tabel data penetapan bencana prioritas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima;

**Tabel 2. Data bencana Prioritas Penanggulangan Bencana Kabupaten Bima**

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Kecenderungan Risiko Kejadian	Tingkat Prioritas
1	Banjir	Tinggi	Naik	Prioritas 1
2	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tetap	Prioritas 1
3	Epidemi dan Wabah Penyakit	Sedang	Tetap	Prioritas 2
4	Gempabumi	Sedang	Tetap	Prioritas 2
5	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	Tetap	Prioritas 1
6	Kekeringan	Tinggi	Tetap	Prioritas 2
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tetap	Prioritas 2
8	Letusan Gunungapi	Tinggi	Tetap	Prioritas 1
9	Tanah Longsor	Tinggi	Tetap	Prioritas 1
10	Tsunami	Sedang	Tetap	Prioritas 2

Prioritas utama penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Bima pada jenis-jenis bencana yang berada pada prioritas 1 dan prioritas 2 yang berada pada zona merah dalam matrik penentuan bencana prioritas.

Kemudian dalam menyebarkan informasi dan mensosialisasikan berbagai program untuk mendukung kinerja BPBD Kabupaten Bima, humas BPBD maupun humas Pemerintah Daerah harus aktif menggunakan media sosial. Agar lebih mudah dan efektif dalam membangun budaya sadar bencana untuk masyarakat Kabupaten Bima. Hal ini dianggap efektif karena rata-rata Masyarakat Kabupaten Bima sudah melek teknologi dan informasi serta penggunaan media sosial. Penggunaan media Fanpage Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube menjadi alternatif sebagai aksi untuk penyebaran informasi yang efektif dan efisien dalam mensosialisasikan upaya penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Bima.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Indra Nurjaya selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Bima;

*“Melihat Kelemahan-kelemahan tersebut kami berupaya dengan mengusung rencana kontingensi, sehingga dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bima bisa terlibat sesuai dengan tupoksi masing-masing, karena rencana kontingensi itu menjadi sebuah produk daerah sebagai rujukan bagi seluruh SKPD untuk memahami resiko bencana (Dokumen Renkon)”*.

## Penggunaan Teknologi, Riset, dan Pengembangan

Pada dasarnya bencana alam berdampak merusak secara ekonomi, fisik dan sosial sehingga patut dikurangi secara kolektif, dengan memanfaatkan teknologi, pengetahuan, informasi, dan sumber daya manusia.

Menurut Sosiawan (2014), salah satu sarana yang vital diperlukan dalam penanggulangan bencana alam adalah teknologi komunikasi dan informasi. Bencana-bencana besar yang pernah terjadi di Aceh, Yogyakarta, Sumatra Barat dan Daerah-daerah yang rawan bencana, dimana pada saat terjadi bencana semua sarana komunikasi publik lumpuh total sehingga menyebabkan terjadinya berbagai isu yang tidak jelas yang menyebabkan kepanikan luar biasa bagi masyarakat.

Selama ini Pemerintah Daerah tampaknya memiliki kegagapan dalam upaya mengantisipasi bencana khususnya dalam dukungan sarana sistem komunikasi dalam penanggulangan bencana. Dukungan sistem komunikasi yang tidak memadai akan berdampak pada macetnya koordinasi dan penanganan cepat. Akibat yang lebih parah lagi adalah terjadinya kegagapan dan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar yang senantiasa terulang kembali tiap kali bencana alam datang.

Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tergolong rawan bencana. Maka dari itu akan sangat membantu jika penggunaan teknologi maju diterapkan dalam penanganan bencana terutama ketika bencana alam datang agar lebih cepat mendapat respon dari pusat. Selain itu, penggunaan teknologi juga untuk mempermudah koordinasi dalam penanganan bencana di Kabupaten Bima.

Sebab respon cepat penanganan bencana merupakan salah satu indikator kinerja penanggulangan bencana di Daerah. Sebagai bentuk peningkatan kinerja penanganan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima sudah didukung pengoperasian Pusat Pengendalian Operasi (Pusdolops) Penanganan Bencana.

Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, telah mendapatkan hibah seperangkat alat komunikasi berupa 1 monitor *mondopad* 2.0 ukuran 80 inci. Alat ini digunakan untuk berkoordinasi dalam penanganan bencana di daerah ke BNPB.

Berikut penjelasan dalam wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Penanganan Kebakaran BPBD Kabupaten Bima;

*“Monitor mondopad senilai Rp 1,6 miliar, alat ini merupakan alat tercepat untuk mengatasi penanganan bencana di Kabupaten Bima. Perangkat ini menggunakan prosesor Intel i7 dan RAM sebesar 8 GB, konektivitas Bluetooth 4.0 dan HDMI, serta pilihan-pilihan kamera dengan sambungan USB 3.0 yang bisa digunakan untuk video call ke BNPB dan kantor BPBD di seluruh Indonesia. Sehingga ketika ada bencana, Pusdalop bisa menerima laporan melalui siaran videocall dan radio langsung dari lokasi bencana. Informasi tersebut diverifikasi dan selanjutnya dikirim ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNPB Jakarta. BPBD Bima juga mendapat bantuan 1 unit radio komunikasi dari BNPB RI, yang terhubung langsung ke BNPB dan kantor BPBD di seluruh Indonesia. Secara teknis, perangkat radio ini menjadikan komunikasi radio terkait kebencanaan hanya terpusat di BPBD. Radio amatir tidak lagi mengeluarkan statement sendiri-sendiri berkaitan dengan informasi kebencanaan yang bisa menimbulkan bias informasi dan kepanikan di tengah masyarakat”.*

Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi) Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Bima juga dilengkapi beberapa unit komputer untuk verifikasi dan pengolahan data kebencanaan. Kehadiran perangkat komunikasi canggih ini diharapkan semakin mempercepat akses informasi dan kaji cepat dampak bencana oleh personel BPBD. Disamping memudahkan



mitigasi bencana dan semakin cepat mengambil keputusan dalam penanganan bencana. Soal jaringan informasi, BPBD Kabupaten Bima sudah melakukan kolaborasi dengan BMKG sehingga pemantauan iklim dan cuaca bisa diinformasikan langsung dari BPBD.

Selain itu pada tahun 2020, BPBD Kabupaten Bima mendapat bantuan dari BNPB dan BMKG kaitannya dengan alat pendeteksi longsor yang telah terpasang di Kecamatan Lambitu sebagai kawasan rawan longsor. Dimana alat tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi retakan tanah. Selain itu, BPBD juga mendapatkan bantuan alat pendeteksi gempa atau alat pemantau gempa Seismograf. Alat tersebut dipergunakan untuk mendeteksi gempa bumi atau getaran pada permukaan tanah. Ketika gempa terjadi maka akan segera dideteksi, maka pena pada seismograf akan bergerak menggambarkan tingkat getaran pada kertas.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan Bapak Indra Nurjaya selaku sekretaris BPBD Kabupaten Bima;

*“BPBD Kabupaten Bima mendapat bantuan dari BNPB dan BMKG kaitannya dengan alat pendeteksi longsor yang telah terpasang dilambitu, untuk mengidentifikasi retakan tanah, kemudian BPBD juga mendapatkan bantuan alat pendeteksi gempa atau alat pemantau gempa artinya walaupun gempa terjadi alat itu bisa dengan sekejap mengukur kekuatan gempa dan mengidentifikasi titik pusat gempa sehingga walaupun magnitudo gempa tinggi, alat itu akan menginstruksikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kepala daerah terkait dengan Kesiapsiagaan.”*

Demikian dalam upaya melaksanakan riset yang berkelanjutan. Pada dasarnya riset tentang kebencanaan sebagai langkah untuk mengetahui ancaman dan potensi, memperkuat protokol kebencanaan, guna meminimalisir risiko. Melalui publikasi hasil riset secara resmi, masyarakat diharapkan lebih memahami lokasi yang menjadi tempat tinggalnya, apakah berpotensi ancaman bencana tertentu atau tidak.

Riset-riset kebencanaan bermanfaat membuat Pemerintah Daerah dan masyarakat lebih waspada dan antisipatif terhadap potensi terjadinya bencana. Karena secara teknologi belum ada yang bisa memprediksi kapan bencana itu akan terjadi. Untuk itu, mitigasi terhadap dampak bencana melalui upaya riset kebencanaan perlu terus di perkuat.

Demikian Pemerintahan daerah Kabupaten Bima perlu menerapkan hasil riset kejadian bencana secara maksimal dan terstruktur. Untuk memaksimalkan hasil riset kejadian bencana tersebut, pemerintah daerah perlu mempublikasikan hasil riset tersebut kepada pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana dan masyarakat di Kabupaten Bima. Kerjasama pemerintah Kabupaten Bima dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Bima baik tingkat dasar maupun perguruan tinggi perlu dilakukan, karena keberlanjutan pembangunan ketahanan dan budaya aman di suatu daerah secara terus menerus amat bergantung kepada pendidikan dan pengetahuan.

Pengurangan risiko bencana diajarkan di lembaga pendidikan formal tidak hanya dalam bentuk teori tetapi juga praktek terkait pengurangan risiko bencana. Salah satu indikator keberhasilan upaya pengurangan risiko daerah dapat dilihat dari rendahnya biaya pemulihan pasca bencana. Metode pengurangan biaya pemulihan dilakukan berdasarkan riset-riset yang dilaksanakan oleh para ahli dan akademisi. Riset tersebut ditujukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan para ahli semata tetapi juga harus mampu diterapkan pada tingkat rumah tangga.

Dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018-2022, mengupayakan melalui kegiatan riset kebencanaan yang berkelanjutan diharapkan adanya perubahan jangka panjang yang berfokus pada pergeseran paradigma untuk pengurangan risiko



bencana yang lebih efektif. Pola pergeseran paradigma dapat menggunakan pengembangan strategi pendidikan dan penyadaran pada pendidikan formal, nonformal, informal dan maupun sosialisasi informasi lewat media Pemerintah Daerah.

Pergeseran paradigma ini diharapkan membuat trend baru dan bagian dari gaya hidup modern di masyarakat Kabupaten Bima. Sangat penting untuk membangun paradigma ini menjadi sesuatu yang dihargai dan berkembang dengan pola-pola yang mungkin ditiru oleh masyarakat. Upaya dasar yang dapat dilakukan dengan pemberdayaan hasil riset terapan baik dari perguruan tinggi maupun penelitian yang berkaitan penanggulangan bencana. Salah satunya melalui kajian rasio perbandingan investasi (*cost benefit analys*) terhadap setiap fase penanggulangan bencana.

Selain itu dapat dikembangkan juga hasil riset yang dapat diterapkan secara langsung oleh individu dan keluarga seperti pembangunan rumah aman Gempa, sumur resapan dan lain lain. Diharapkan dengan adanya beberapa riset terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bima dapat menurunkan kerentanan daerah terhadap risiko multi bahaya.

## **KESIMPULAN**

Data tingkat Kapasitas Daerah dalam penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa aspek kesiapsiagaan masyarakat melalui data PODES dan indepthinterview pada pemangku jabatan di tingkat kecamatan masih sangat lemah. Bahwa akibat lemahnya indeks kapasitas daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana, menyebabkan tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap berbagai jenis bencana juga rendah, otomatis tingkat resiko yang akan terjadi pada masyarakat sangat rentan. Kebijakan kesiapsiagaan masyarakat belum menjadi prioritas kegiatan. Namun dalam memperkuat kesiapsiagaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima perlu menerapkan kebijakan kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana. Pemerintah Kabupaten Bima juga mendalami rencana kontingensi bencana yang siap di semua jenjang Pemerintahan, pengadaan latihan reguler untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana. Serta yang paling penting Pemerintah Daerah harus menyediakan cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanggulangan bencana yang efektif. Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima adalah dengan menetapkan bencana prioritas. Penentuan bencana prioritas di Kabupaten Bima dengan menggunakan matrik bencana prioritas berdasarkan data tingkat risiko bencana, dan data kecenderungan kejadian bencana untuk masing-masing jenis bencana.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Rianto. 2004. *Metodelogi Sosial dan Hukum*. Granit. Jakarta.
- Ahdi, D. (2015). Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko. *REFORMASI*, 5(1), 13-30.
- Altay, N., & Green III, W. G. (2006). OR/MS research in disaster operations management. *European journal of operational research*, 175(1), 475-493.
- Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan petani: peran dan strategi pengembangan kapasitasnya. *Jurnal Sepa*, 7(2), 102-109.
- Bass, B. M., & Steidlmeier, P. (1998). Ethics, character, and authentic transformational leadership. {Online}. *Bulundu u adres: <http://cls.binghamton.edu/BassSteid.html>*.
- Black, A. James dan J. Champion, Dean, 2009. *Metode & masalah penelitian Sosial*. Bandung. *Refika Aditama*. Cetakan keempat.
- Cabarcos, M., Angeles L., Monteiro, S. G. Oliveira., & Rodriguez, P. V. (2015). Organizational Capabilities And Profitability: The Mediating Role Of Business Strategy. Spain – Portugal. *Sage Journals*. Open October-December 2015: 1-13.
- Djalante, R. (2012). Adaptive Governance And Resilience: The Role Of Multi-Stakeholder Platforms In Disaster Risk Reduction.
- Eaton, J. W. 1986. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: Dari Konsep ke Aplikasi*. Penerbit UI-Press. Jakarta.
- Faturahman, B. M. (2017). Reformasi Administrasi Dalam Manajemen Bencana. *Mimbar Yustitia*, 1(2), 185-201.
- Faizah, N., & Buchori, I. (2018). *Model Pemetaan Risiko Kekeringan Di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat* (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).
- Handayani, R. (2011). Analisis Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Manajemen Bencana Di Kabupaten Serang Provinsi Banten.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial “Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif” edisi kedua*. Jakarta. Erlangga.
- Khatri, N. (2005). An alternative model of transformational leadership. *Vision*, 9(2), 19-26.
- Sosiawan, E.A. (2014). Model ideal manajemen teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung operasional penanganan bencana alam. *Jurnal ilmu Pengetahuan dan teknologi Komunikasi*, 17(2), 175-188
- Suri, N. K. (2016). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo dalam upaya penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. *PERSPEKTIF*, 5(1).
- Ulum, M. C. (2014). *Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Gava Media. Yogyakarta.

Wijayanti, I., Pneumatica, O., & Nurjannah, S. (2018). Perempuan Bima dan Strategi Adaptasi Pasca Bencana Banjir Bandang (Studi Kasus Peran Perempuan di Kabupaten Bima, NTB). *Simulacra: Jurnal Sosiologi*, 1(1), 5-18.

Dokumen RPB BPBD Kabupaten Bima Tahun 2018-2022

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Perda Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Daerah